

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Healy dan Wahlen (1998) menyatakan bahwa manajemen laba merupakan proses di mana manajemen memiliki kemampuan untuk menggunakan deskresi yang mereka miliki untuk mempengaruhi hasil kontraktual mereka dengan pemilik perusahaan. Manajemen laba dipandang sebagai salah satu bentuk manipulasi kinerja perusahaan dan merupakan tindakan manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk memengaruhi tingkat laba yang ditampilkan (Iqbal dan Nurul, 2005 dalam Jayengsari dan Soetedjo, 2013).

Praktik ini sering disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik perusahaan (*agency problem*). Adanya insentif tertentu berupa kompensasi bonus dari pemilik kepada manajemen menambah ketertarikan manajemen untuk melakukan manajemen laba. Laporan keuangan yang telah dimanipulasi tidak mampu memberikan informasi yang sebenarnya sehingga dianggap merugikan pihak pengguna laporan keuangan terutama pihak eksternal (Jayengsari dan Soetedjo, 2013).

Ada berbagai kasus manajemen laba yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2011 PT Lippo Tbk dan PT Kimia Farma melakukan

manipulasi laporan keuangan. PT Kimia Farma merupakan perusahaan penghasil obat-obatan milik pemerintah Indonesia. Pada audit 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan keuangan tersebut diaudit oleh kantor akuntan publik Hans Tuanakotta dan Mustofa (HTM), akan tetapi kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang tanggal 3 Oktober 2002, laporan keuangan Kimia Farma tahun 2001 disajikan kembali karena telah ditemukan kesalahan audit yang cukup mendasar. Pada laporan keuangan tahun 2001 yang baru, keuntungan yang disajikan hanya sebesar Rp 99.56 miliar, atau lebih rendah sebesar Rp 32.44 miliar, atau 24.7% dari laba awal yang dilaporkan.

PT Lippo juga memiliki kasus yang hampir sama, yaitu manipulasi harga saham Bank Lippo, dan melakukan peningkatan saham Grup Lippo. Melalui anak usahanya, PT Lippo E-Net Tbk, kelompok Lippo diduga telah melakukan pembelian kembali saham milik Bank Lippo sendiri (*buyback*) dari publik melalui bursa, namun disiyalir tidak terdapat pelaporan mengenai hal tersebut. Semua data mengungkap adanya peningkatan persentase kepemilikan Lippo E-Net terhadap saham Bank Lippo mulai tahun 2000. Pada tahun tersebut, Lippo E-Net menguasai 7.21% kepemilikan Bank Lippo, namun kepemilikan tersebut naik menjadi 9.57% pada tahun 2002.

Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa praktik manipulasi laporan keuangan tetap dilakukan oleh pihak korporat meskipun telah menjauhi krisis

tahun 1997-1998. Semua hal tersebut mengindikasikan lemahnya praktik *corporate governance* yang dilakukan perusahaan.

Corporate governance sendiri merupakan sebuah konsep yang didasari oleh teori keagenan, yang diharapkan dapat berfungsi sebagai suatu alat untuk memberikan keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas materi yang telah mereka investasikan. *Corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para investor yakin bahwa manajer akan memberikan keuntungan bagi mereka, serta yakin bahwa manajer tidak menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan berkaitan dengan dana (*capital*) yang telah ditanamkan oleh investor, dan berkaitan dengan bagaimana para investor mengontrol para manajer (Saputri, 2009 dalam Anggriana, 2011).

Corporate governance diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan melalui pengawasan atau *monitoring* kinerja manajemen serta menjamin terciptanya akuntabilitas manajemen terhadap *principal* berdasarkan peraturan yang ada. Konsep *corporate governance* ini pada intinya menghendaki adanya transparansi bagi semua pengguna laporan keuangan yang bila berhasil diterapkan dengan baik maka secara otomatis akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Berdasarkan teori keagenan, manajemen laba dapat diminimalisir melalui aplikasi monitoring untuk menyelaraskan kepentingan pemilik perusahaan dengan cara: pertama, memperbesar kepemilikan saham oleh manajemen (Jensen and Meckling, 1976); kedua, adanya kepemilikan saham oleh institusional (Midiastuty

dan Machfoedz, 2003); ketiga, melalui peran pengawasan monitoring oleh komisaris independen (Boediono dan Gideon, 2005).

Ukuran perusahaan merupakan *proxy* atas perhatian politik dan menuntun perusahaan ke dalam *political cost* (Watts dan Zimmerman, 1990). Maka dari itu, timbul suatu kemungkinan bagi manajemen untuk melakukan manajemen laba demi menjaga nama baik perusahaan. Trilestari, dkk (2012) dan Ningsaptiti (2010) dalam Jayengsari dan Soetedjo (2013) pada perbankan memberi kesimpulan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.

Manajer biasanya mempunyai informasi yang lebih baik dibanding pihak luar. Adanya asimetri informasi antara manajer dan investor disebabkan karena manajer mempunyai informasi yang lebih lengkap mengenai kondisi perusahaan dibandingkan dengan pihak luar. Investor yang merasa mempunyai informasi lebih sedikit, akan berusaha menginterpretasikan perilaku manajer. Perspektif asimetri informasi mengimplikasikan bahwa manajer berupaya untuk mengurangi asimetri informasi guna memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara yang dikehendakinya. Ketika terdapat asimetri informasi, keputusan pengungkapan yang dibuat manajer dapat mempengaruhi harga saham karena asimetri informasi antara investor yang lebih terinformasi dan kurang terinformasi akan menimbulkan biaya transaksi dan mengurangi likuiditas pada saham suatu perusahaan (Paulinda dan Putra, 2013). Diantimala dan Hartono (2001) dalam

Putra (2013) mengungkapkan bahwa regulasi pengungkapan mempunyai potensi untuk mengurangi asimetri informasi.

Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Ketika asimetri informasi tinggi, *stakeholder* tidak memiliki sumber daya yang cukup, insentif, atau akses atas informasi yang relevan untuk memonitor tindakan manajer, dimana hal ini memberikan kesempatan atas praktek manajemen laba. Adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer (Paulinda dan Putra, 2013).

Selain itu, setiap periode perusahaan selalu diaudit oleh auditor eksternal dengan kualitas audit yang berbeda-beda untuk untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara manajer dan para pemegang saham. Suatu KAP yang lebih besar disinyalir memberikan kualitas audit yang lebih baik (Meutia, 2004). Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa terdapat hubungan antara kualitas audit dengan manajemen laba (Meutia, 2004). Hasil yang bertentangan diperoleh Palestin (2008), Siregar dan Januar (2012) yang menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.

Adanya kompensasi bonus yang diperoleh oleh manajemen serta tekanan menjadi perhatian masyarakat berpotensi menimbulkan manajemen laba di perusahaan (Javengsari dan Soetedio 2013). Dengan adanya aturan khusus

tentang pelaksanaan *good corporate governance* dan pentingnya peranan auditor dalam mendeteksi manajemen laba, seharusnya sudah mampu untuk mencegah praktik manajemen laba di perusahaan. Tetapi, merujuk pada hasil penelitian sebelumnya, terdapat hasil yang bervariasi sehingga membuat peneliti tertarik untuk menguji kembali hubungan *good corporate governance* yang meliputi kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, ukuran perusahaan, asimetri informasi, kualitas audit perusahaan, serta kompensasi bonus yang diperoleh manajemen berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.

Bangkitnya ekonomi Islam di Indonesia dewasa ini menjadi fenomena yang menarik dan menggembirakan terutama bagi penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Praktek kegiatan ekonomi konvensional, khususnya dalam kegiatan pasar modal yang mengandung unsur spekulasi sebagai salah satu komponennya, tampaknya masih menjadi hambatan psikologis bagi umat Islam untuk turut aktif dalam kegiatan investasi terutama di bidang pasar modal. Dengan dikembangkannya produk-produk investasi syariah di pasar modal Indonesia, diharapkan bisa mewujudkan pasar modal Indonesia menjadi suatu market yang bisa menarik para investor yang ingin berinvestasi dengan memperhatikan kesesuaian produk dan instrumen yang sejalan dengan kaidah-kaidah ajaran Islam. Oleh karena itu, diperlukan informasi akuntansi yang relevan sebagai data dasar dalam melakukan analisis saham serta untuk memprediksi

prospek laba di masa mendatang, tak terkecuali pada perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Syariah.

Pasar modal syari'ah di Indonesia telah berkembang dengan cukup pesat dari tahun ketahun. Periode 2006-2010 merupakan periode awal perkembangan dengan basis yang cukup baik. Beberapa peraturan terkait dengan prinsip syariah di pasar modal telah diterbitkan, antara lain Peraturan OJK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syari'ah, Peraturan OJK Nomor IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah, dan Peraturan OJK Nomor II.K.I tentang kriteria dalam Penerbitan Efek Syari'ah.

Produk pasar modal syari'ah seperti saham syari'ah, sukuk (obligasi syari'ah), dan reksa dana syari'ah mulai berkembang pesat pada periode 2006-2010. Selanjutnya, sejak tahun 2007 BAPPEPAM-LK secara periodik telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) yang isinya memuat saham-saham yang sesuai dengan prinsip-prinsip saham syariah. Jumlah saham yang termuat dalam Daftar Efek Syari'ah dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan. Saat ini terdapat 317 saham yang memenuhi kriteria syaria'ah (Saputro, 2013).

Perbedaan mendasar antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah dapat dilihat pada instrumen dan mekanisme transaksinya, sedangkan perbedaan nilai indeks saham syariah dengan nilai indeks saham konvensional terletak pada kriteria saham emiten yang harus memenuhi prinsip-prinsip dasar syariah. Prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) yaitu :

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
5. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian atau spekulasi), dan gharar (ketidakjelasan atau samar-samar).

Berdasarkan keterangan di atas, maka kegiatan di pasar modal syariah mengacu pada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan pasar modal syariah tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Semua transaksi yang terjadi di bursa efek syariah tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi atau mendzalimi. Tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulatif atau judi dan semua transaksi harus transparan dan menghindari adanya manajemen laba karena terdapat unsur ketidakjujuran (Hanani, 2011).

Penelitian terdahulu banyak dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam bursa konvensional, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada bursa syariah. Selain itu, jumlah perusahaan yang termasuk di Daftar Efek Syariah lebih banyak daripada perusahaan yang termasuk di Jakarta Islamic Index sehingga dapat diperoleh populasi penelitian yang lebih banyak dalam satu jenis perusahaan.

Penelitian ini berasumsi bahwa pasar modal di Indonesia bersifat *strong efficient*, yaitu harga saham mencerminkan informasi baik yang fundamental maupun non fundamental, dengan kecenderungan informasi fundamental lebih dominan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti mengajukan penelitian dengan judul **“ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PRAKTIK MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI DAFTAR EFEK SYARIAH”**. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Jayengsari dan Soetedjo (2013). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terdapat pada variabel independen yang awalnya adalah *Good Corporate Governance*, komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kualitas audit, kompensasi bonus, dan ukuran perusahaan. Ditambah dengan adanya isu terbaru tentang asimetri informasi berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Perbedaan lain terdapat pada data yang digunakan. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan syariah yang terdaftar pada Daftar Efek Syariah (DES) tahun 2014.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini permasalahan dibatasi pada aspek-aspek sebagai berikut yaitu *Good Corporate Governance* mencakup banyak hal namun, peneliti membatasi penelitian ini dengan hanya memasukan kepemilikan manajerial,

kepemilikan institusional, komisaris independen, serta kualitas audit sebagai mekanisme *Good Corporate Governance* yang dapat berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba?
3. Apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba?
5. Apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba?
6. Apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba?
7. Apakah kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap praktik

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji apakah kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.
2. Untuk menguji apakah kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.
3. Untuk menguji apakah komisaris independen berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.
4. Untuk menguji apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.
5. Untuk menguji apakah asimetri informasi berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba.
6. Untuk menguji apakah kualitas audit berpengaruh negatif terhadap praktik manajemen laba.
7. Untuk menguji apakah kompensasi bonus berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang besar. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat pada Bidang Teoritis

- a. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen laba serta sejauh mana faktor-faktor tersebut dapat berpengaruh.
- b. Memberikan kontribusi dalam penelitian akuntansi selanjutnya, khususnya pada kajian akuntansi keuangan syariah mengenai *corporate governance* dan manajemen laba.
- c. Menambah pemahaman tentang corporate governance dan manajemen laba di Indonesia, khususnya pada perusahaan syariah go publik di Indonesia.

2. Manfaat pada Bidang Praktik

- a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian manajer dalam menghadapi kondisi internal maupun eksternal perusahaan.
- b. Sebagai bahan pertimbangan untuk para investor dalam menganalisa dan mempercayai laporan keuangan.
- c. Sebagai bahan rujukan maupun referensi untuk penelitian selanjutnya dan dapat memperkaya wawasan.